



Buletin Parlementaria

Nomor 1200/IV/V/2022 • Mei 2022



DPR Batalkan Pelaksanaan Pengadaan Gorden RJA



3 Apresiasi Kebijakan Lepas Masker, Puan Maharani Ingatkan Masyarakat Tak Terbawa Euforia



4 DPR Telah Terima Suspres RUU Tiga DOB Papua dari Pemerintah



9 772614 339005

DPR Batalkan Pelaksanaan Pengadaan Gorden RJA



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso, Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi, dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat konferensi pers di Media Center. Foto: Oji/nvl

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menegaskan segenap Pimpinan dan Anggota BURT DPR RI bersama Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bersepakat untuk membatalkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase dan *blind* jendela untuk seluruh Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata. Ia menegaskan kesepakatan tersebut sebagaimana merupakan hasil kesimpulan rapat antara BURT DPR RI dengan Setjen DPR RI.

“Usai rapat, BURT DPR RI memutuskan bersama Setjen DPR RI untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden-vitrasi rumah jabatan anggota RJA DPR RI Kalibata. Hal itu yang menjadi kesimpulan rapat

setelah melalui rapat dan diskusi panjang antara BURT dengan Setjen DPR RI,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut saat memimpin konferensi pers BURT DPR RI dan Setjen DPR RI di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi juga mengungkapkan BURT dan Setjen DPR RI bersepakat pengadaan gorden untuk RJA DPR RI Kalibata tahun 2022 dibatalkan. “Pimpinan dan Anggota BURT DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Setjen DPR RI secara mendetail hasil *review* yang telah dilakukan oleh pihak Inspektorat Setjen DPR RI. Dari pembahasan yang telah disampaikan baik oleh Sekjen maupun Inspektorat DPR, kami semua bersepakat pengadaan gorden untuk

RJA DPR RI Kalibata tahun 2022 tidak dilanjutkan,” tandas politisi PDI-P itu.

Senada, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan kembali Sekretaria Jenderal DPR RI bersama segenap Pimpinan dan Anggota BURT DPR RI berkesimpulan untuk tidak melanjutkan pengadaan gorden, vitrase dan *blind* jendela untuk seluruh RJA DPR RI di Kalibata. “Hasil diskusi kami dengan Pimpinan dan Anggota BURT DPR RI bahwa kami semua berkesimpulan untuk tidak melanjutkan pengadaan gorden, vitrase dan *blind* untuk seluruh RJA DPR RI di Kalibata,” pungkas Indra. Turut hadir dalam konferensi pers itu Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti, Wakil Ketua BURT DPR RI H.A Bakri dan Anggota BURT DPR RI Andre Rosiade. ■ pun/aha



Apresiasi Kebijakan Lepas Masker, Puan Maharani Ingatkan Masyarakat Tak Terbawa Euforia

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pelonggaran penggunaan masker di tengah masyarakat. Menurutnya, dibolehkannya masyarakat untuk melepas masker di ruang terbuka telah sesuai dengan kondisi semakin baik dan transisi dari pandemi Covid-19 endemi Covid-19.

“DPR RI mengapresiasi penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah sehingga kini masyarakat bisa melepas masker saat beraktivitas di luar ruang atau di area terbuka yang tidak ramai,” ungkap Puan dalam keterangan resmi kepada **Parlementaria**, Rabu (18/5).

Politisi PDI-Perjuangan ini berharap kebijakan pelonggaran penggunaan masker tidak ditanggapi dengan euforia berlebihan sehingga abai terhadap protokol kesehatan lainnya. Mantan Menko PMK ini juga menyarankan kepada masyarakat agar tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai patokan dalam beraktivitas.

“Masker yang kita pakai akan mencegah berbagai macam penyakit yang ditularkan lewat udara. Protokol kesehatan melindungi diri dan keluarga. Jangan terlalu euforia karena pelonggaran penggunaan



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/mvl

masker ini. Protokol kesehatan lain seperti mencuci tangan dengan sabun tidak hanya mencegah Covid-19 saja, tapi juga penyakit lain,” ungkap Puan.

Legislator dapil Jawa Tengah V tersebut juga meminta masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi kesehatan, terlebih karena Indonesia mulai memasuki musim pancaroba yang rentan memunculkan berbagai penyakit. “Kalau bisa budayakan kebiasaan memakai masker seperti budaya higienis masyarakat Jepang sebagai proteksi diri dan lingkungan sekitar,” tutup Puan. ■
uc/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firsa Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitomput, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

DPR Telah Terima Surpres RUU Tiga DOB Papua dari Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari pemerintah terkait pembahasan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Yaitu, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan (Ha Anim), RUU tentang Provinsi Papua Tengah (Meepago), serta RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago).

Surpres tersebut diberikan ke DPR pasca telah disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (12/4) silam. Sehingga, dengan adanya Surpres tersebut, Presiden RI menugaskan kementerian/ lembaga terkait sebagai perwakilan pemerintah untuk membahas bersama dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang ditugaskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

“Yang jelas saya sudah terima tembusannya (surpres). Ada. Setelah itu kita akan acarkan dalam rapim dan kita bawa dalam Rapat Bamus. Tentunya, itu akan kita sahkan dalam rapat paripurna. Jadi sudah siap dibahas, sudah final. Namanya surpres

sudah masuk,” ujar Lodewijk kepada awak media di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Tidak hanya Surpres, menurut politisi Partai Golkar itu, DPR RI juga telah menerima poin-poin yang akan dibahas dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Adapun beberapa menteri yang telah diutus tersebut, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menteri PAN-RB, dan Menteri Keuangan. Meskipun demikian, ia tak menampik jika ada masyarakat Papua yang menyampaikan aspirasi penolakan terhadap tiga RUU tersebut.

“Jadi, meskipun ada yang menolak, (pembahasan tiga RUU) itu tetap lanjut. Karena itu

kan namanya aspirasi. Orang macam-macam pandangannya, kita tampung maunya apa nanti akan kita bahas selanjutnya,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut.

Dalam RUU tersebut disebutkan Provinsi Papua Selatan (Ha Anim) akan menjadikan Merauke sebagai ibu kota, kemudian ibu kota Provinsi Papua Tengah (Meepago) akan berada di

Timika, dan ibu kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago)

adalah Wamena. Setelah RUU soal pemekaran wilayah di Papua ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR di Rapat Paripurna, pembahasan RUU akan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat I bersama pemerintah. ■ rdn/sf

Wakil Ketua DPR RI
Kordinator Bidang Politik
dan Keamanan (Korpolkam)
Lodewijk F. Paulus.
Foto: Faisal/nvl





Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan V pada Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Dev/nvl

DPR Prioritaskan Penuntasan RUU dalam Pembahasan Pembicaraan Tingkat I

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan penuntasan pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I. Dirinya menjelaskan, pembentukan Undang-Undang yang diselenggarakan oleh DPR RI dan pemerintah, saat ini difokuskan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional.

“Dalam pembentukan Undang-Undang melalui berbagai pembahasan, semakin dituntut adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pandangannya,” ujar Dasco saat membacakan pidato pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5). Dasco membacakan pidato mewakili Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu pun menekankan, DPR RI berkomitmen agar dapat menghasilkan produk Undang-Undang yang selaras dengan UUD NRI 1945 memiliki landasan sosiologis

yang kuat, mengutamakan kepentingan nasional, dan juga membuka ruang partisipasi rakyat.

Diketahui, dalam Masa Persidangan V, terdapat sejumlah agenda strategis, diantaranya penuntasan pembahasan sejumlah RUU pada pembicaraan tingkat pertama, pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN Tahun Anggaran 2023, antisipasi kebijakan dan ketahanan fiskal pada tahun 2022 untuk merespon perkembangan perekonomian global yang membebani keuangan negara, serta persiapan tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai pada 2022 ini.

Selain itu, Dasco menuturkan bahwa pencapaian kondusif yang diperoleh Indonesia saat ini tidak lepas dari kerja sama dan gotong royong seluruh elemen dalam menghadapi Covid-19 hingga terlihatlah kasus Covid-19 yang terus mengalami tren penurunan, vaksinasi yang terus meningkat, dan kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat mulai kembali pulih secara bertahap. “Inilah kekuatan nasional kita, kebersamaan seluruh anak bangsa dan komponen bangsa, yang dipersatukan dalam semangat gotong royong menghadapi pandemi Covid-19,” tegas politisi Partai Gerindra itu. ■ hal/sf

Sukamta Kecam Penembakan Jurnalis Al-Jazeera oleh Tentara Zionis

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengemukakan aksi tindakan pasukan zionis yang menewaskan seorang jurnalis senior Al Jazeera Shireen Abu Akleh karena tertembak oleh tentara Israel saat meliput bentrokan di Kota Jenin, Tepi Barat. Menurutnya, hal ini merupakan kejahatan yang sangat keji dan jelas-jelas melanggar hukum humaniter internasional.

Sukamta menduga, ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan terhadap wartawan sebagai upaya untuk menutupi fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh tentara pendudukan Zionis di



Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Mentari/nvi



MEMINTA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENDORONG UPAYA PENYELIDIKAN SECARA MENYELURUH DAN TRANSPARAN ATAS KASUS PEMBUNUHAN JURNALIS INI OLEH OTORITAS PALESTINA DAN PEMERINTAH ISRAEL DENGAN MELIBATKAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC).

wilayah Tepi Barat. “Upaya yang sama juga pernah dilakukan oleh tentara Israel dengan melakukan pemboman terhadap kantor Al-Jazeera di Jalur Gaza yang juga menampung wartawan Associated Press (AP),” ungkap Sukamta dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (12/5).

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mendorong upaya penyelidikan secara menyeluruh dan transparan atas kasus pembunuhan jurnalis ini oleh otoritas Palestina dan Pemerintah Israel dengan melibatkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

“Ini penting untuk dilakukan sehingga ada rasa aman bagi insan pers yang bertugas di lapangan.

Dengan adanya kasus ini, PBB mestinya juga memberikan peringatan secara keras kepada Pemerintah Zionis untuk menghentikan tindakan brutalnya kepada wartawan dan masyarakat sipil,” tegas legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.

Sukamta menyatakan, kekerasan di Palestina akan terus berlangsung selama Israel masih melakukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah Palestina. “Akar masalahnya penjajahan masih terus berlangsung. Maka kita sangat berharap pemerintah Indonesia terus mengupayakan melalui diplomasi internasional untuk mendorong kembali skema solusi dua negara dan hadirnya kemerdekaan Palestina,” tutup Sukamta. ■ *we/sf*

Yanuar Prihatin Gantikan Luqman Hakim, Resmi Sebagai Wakil Ketua Komisi II



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Lodewijk F. Paulus berfoto bersama usai memimpin penetapan pergantian Pimpinan Komisi II DPR RI. Foto: Dev/nvl

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus secara resmi menetapkan Yanuar Prihatin sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB menggantikan Pimpinan Komisi II sebelumnya, Luqman Hakim.

Lodewijk mengatakan, berdasarkan Surat Pimpinan Fraksi PKB Nomer 1410 FPKB DPR RI/IV/2022 tanggal 12 April 2022 perihal pergantian Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB DPR RI disampaikan bahwa jabatan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB mengalami perubahan.

“Maka, komposisi Pimpinan Komisi II DPR RI adalah sebagai berikut; Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Junimart Girsang,

Saan Mustofa, Yanuar Prihatin dan Syamsurizal,” ungkap Lodewijk saat memimpin rapat internal Komisi II DPR RI terkait penetapan pergantian Pimpinan Komisi II DPR RI, di ruang rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Selasa (17/5).

Dalam rapat tersebut, Lodewijk meminta persetujuan, yang disusul dengan jawaban 'setuju' dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI baik yang hadir secara langsung, maupun secara virtual. Oleh karena itu, Yanuar Prihatin secara resmi telah sah menduduki kursi Pimpinan Komisi II DPR RI.

Setelah menyerahkan palu sidang, Lodewijk mengucapkan selamat, seraya berharap agar Pimpinan Komisi II DPR RI yang baru saja ditetapkan selalu diberikan petunjuk

kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Dan semoga Tuhan YME selalu diberikan petunjuk dan bimbingan kepada semua, khususnya kepada pimpinan Komisi II dalam melaksanakan tugas dan bangsa dan negara dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu bagi Yanuar, sejatinya duduk di Komisi II DPR RI bukanlah hal baru. Pasalnya selama ini ia pun telah menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI. Sehingga ia berharap ke depan bisa lebih memperkuat pimpinan dan ikut bekerjasama dengan baik bersama seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi ke depan. ■

ayu/aha

Darori Wonodipuro Tegaskan Kementan Harus Segera Tangani Wabah PMK Ternak

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menegaskan agar pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) segera menangani wabah penyakit mulut-kaki (PMK). Dirinya khawatir, jika penanganan wabah tersebut lambat, maka akan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

“Sebagai penanggung jawab program, Kementan tahu dari mana data asal usul kena (wabah PMK) di mana penularannya. Itu bisa diusut ujungnya, apakah sapi ini kena karena impor atau ada wabah yang dibawa ternak lain, kita tunggu saja,” tanggap Darori dalam keterangan tertulis kepada *Parlementaria*, Kamis (12/5).

Lebih lanjut, usai masa reses, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menjelaskan akan membahas wabah PMK dengan Kementan pada rapat yang akan

”

**JIKA PENANGANAN
WABAH LAMBAT, MAKA
AKAN MENYEBAR KE
BERBAGAI DAERAH DI
INDONESIA.**

diselenggarakan pada 17 Mei 2022 mendatang. Dirinya berharap, pemerintah telah siap dengan solusi untuk menangani PMK di Indonesia.

Sehingga, jelasnya, wabah PMK tidak menyebar luas ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, solusi-solusi tersebut bisa menekan kerugian masyarakat Indonesia,

khususnya para peternak hingga konsumen. “Selesai reses, kita akan minta penjelasan dari

Menteri Pertanian dan

Dirjen apa langkah yang dilakukan. Mestinya segera turun mengecek semua,”

tutup Darori. ■ ts/sf

Anggota Komisi IV DPR RI
Darori Wonodipuro.
Foto: Arleff/nvl





Komisi V: Jangan Beban Rakyat dengan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat beranggapan, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif dasar KRL Commuter Line karena berbagai pertimbangan seperti naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng dan BBM. Selain itu, daya beli masyarakat yang ada di berbagai daerah saat ini dinilai masih rendah akibat terdampak pandemi Covid-19.

Agar tidak membebani rakyat, maka Toriq mengharapkan Kementerian Perhubungan sebaiknya melupakan wacana kenaikan tarif KRL. “Untuk sementara waktu sebaiknya Kemenhub juga PT KAI melupakan wacana kenaikan tarif KRL. Sebaiknya fokus menjaga pelayanan yang sudah ada dengan anggaran yang diberikan. Sehingga pengguna KAI Commuter Line Jabodetabek bertambah. Setelah turun hampir 20 persen akibat pandemi,” papar Toriq dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Rabu (18/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun sangat menyayangkan ketika Pelaksana Tugas Kepala Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub kembali mengemukakan tentang usulan

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: Chasbi/nvi



kenaikan tarif KRL dalam sebuah diskusi.

“Apa yang dikemukakan pejabat Kemenhub tersebut tidak selaras dengan yang pernah disampaikan Juru Bicara Kemenhub pada awal Maret lalu. Bahwa implementasi penyesuaian tarif KRL tidak akan dilakukan sebelum puasa dan Lebaran. Kemudian kenaikan



KAMI SEBAGAI WAKIL RAKYAT YANG MEMILIKI TUGAS CONTROLLING DAN BUDGETING BERHAK TAHU PROYEKSI PENINGKATKAN LAYANAN, KAPASITAS DAN FASILITAS KERETA APA SAJA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PT KAI KETIKA TARIF KRL AKAN DINAIKKAN

ini pun akan dikaji kembali setelah lebaran. “Jadi, harusnya dikaji dulu,” tandas Toriq lebih lanjut.

Atas kondisi tersebut, legislator dapil Jawa Barat XI itu menganggap komunikasi terkait wacana penyesuaian tarif KRL antar pejabat di Kemenhub tidak solid. Sebagai mitra kerja, Toriq meminta hasil kajian terbaru. Bukan hanya hasil survei kemampuan membayar (*ability to payment*) dan kesediaan pengguna untuk membayar (*willingness to pay*) kereta api wilayah perkotaan yang lalu saja.

“Kami sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas *controlling* dan *budgeting* berhak tahu proyeksi peningkatan layanan, kapasitas dan fasilitas kereta apa saja yang akan dilakukan oleh PT KAI ketika tarif KRL akan dinaikkan. Benarkah penyesuaian tarif akan menambah ketiganya? Padahal ketika tarif tidak naik sejak 2015, terus terjadi perbaikan yang signifikan,” tutur Toriq. ■ eko/aha

Rudi Hartono Apresiasi Pencabutan Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut aturan larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin, 23 Mei 2022. Pencabutan larangan izin ekspor CPO dan minyak goreng ini tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari banyak pihak. Rudi menilai, berarti berbagi aspirasi rakyat, dalam hal ini petani sawit didengar Presiden Jokowi.

"Saya mengingatkan agar Presiden memantau kinerja menteri yang mengurus perdagangan dan izin ekspor CPO dan minyak goreng. Kuota CPO untuk dalam negeri agar diawasi ketat, agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng. Semua masalah kelangkaan minyak goreng ini terjadi karena adanya permainan pejabat terkait dengan pengusaha minyak goreng," kata Rudi saat dihubungi **Parlementaria**, Kamis (19/5).

Politisi Partai NasDem itu juga mengingatkan, rakyat jangan terus menerus menjadi korban dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Sehingga dengan pencabutan larangan ekspor ini, Rudi yakin industri sawit akan kembali menggeliat dan petani sawit dapat

lebih sejahtera. "Stok kuota DMO (Domestic Market Obligation) harus diperketat. Jadi tidak terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng jadi mahal. Kebutuhan minyak goreng dalam negeri hanya 16 juta ton. Hasil produksi kita 65

juta ton, kelebihanannya masih banyak untuk diekspor," tandas Rudi.

Dalam konferensi pers pada Kamis (19/5), Presiden Jokowi mengatakan ada tiga penyebab mengapa ia akhirnya kembali membuka keran ekspor CPO dan minyak goreng.

Pertama, harga minyak goreng curah sudah turun dari Rp19.800 per liter menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter setelah CPO dilarang sejak 28 April 2022. Kedua, pasokan minyak goreng juga bertambah di pasaran dari yang hanya 64 ribu ton menjadi 211 ribu ton per bulan.

Ketiga, Jokowi mempertimbangkan belasan juta tenaga kerja yang mencari rezeki di industri sawit. Mereka terdampak karena ekspor CPO dilarang. "Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak goreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi. ■ sf

Anggota Komisi VI DPR RI
Rudi Hartono Bangun.
Foto: Ojji/nvl



Legislator Usulkan Rapat Gabungan Untuk Entaskan Masalah Tambang Pasir Laut



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman. Foto: Agung/fvnl

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan permasalahan dalam pertambangan pasir laut sudah cukup lama berlangsung di sejumlah daerah. Tak menutup kemungkinan Komisi VII bersama dengan Komisi lainnya di DPR akan mengadakan rapat gabungan untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut.

Dalam kunjungan kerja (kunker) reses Komisi VII ke BP Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Maman beserta tim mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak guna membahas dan meninjau masalah pasir laut. “Kami melihat bahwa kisruh pasir laut ini lama sekali dari zaman dulu bertahun-tahun belum beres akhirnya disampaikan tadi

(dalam forum) banyak yang dirugikan,” ujarnya ditemui di sela-sela pertemuan di Batam, Kepri, Rabu (11/5).

Untuk itu menurut Maman, dalam situasi sekarang ini perlu dilakukan sebuah terobosan. Apalagi pasir laut diketahui menyimpan potensi ekonomi yang baik, dan sejalan dengan niat negara untuk melakukan untuk percepatan atau peningkatan

”

KAMI MELIHAT BAHWA KISRUH PASIR LAUT INI LAMA SEKALI DARI ZAMAN DULU BERTAHUN-TAHUN BELUM BERES

skala pendapatan negara. “Tentunya tanpa harus mengabaikan aspek sosial masyarakat dan lingkungan juga,” sebut politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu di tengah permasalahan tata kelola, potensi pendapatan dari pasir laut mandek. “Jadi kami hadir untuk mendorong solusi. Bagaimana pemerintahan ada *political will* agar serius menyelesaikan permasalahan di tengah kondisi ada tarik-menarik kewenangan antara dua Kementerian, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral),” terang Maman.

Legislator dapil Kalimantan Barat I itu memaparkan sempat ada usulan minimal dilangsungkannya rapat gabungan lintas komisi yang dapat diinisiasi oleh pimpinan DPR RI. Bahkan kata Maman, tidak menutup kemungkinan Komisi VII akan mendorong Pansus gabungan beberapa komisi terkait.

Selain itu, Maman mengatakan jika persoalan ini dapat terselesaikan, maka dampak ekonominya akan positif bagi daerah. Dimana berdasarkan pertemuan tersebut terdapat pemaparan bahwa kebutuhan pasir laut untuk pengembangan di wilayah Batam sangat besar. Hal tersebut menjadi sedikit terhambat lantaran persoalan tata kelola pasir laut yang hingga kini belum usai. ■aha

Komisi VII Minta Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri PT Kalbe Ditingkatkan

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyampaikan sejumlah upaya agar bisa meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri untuk hasil produksi industri PT Kalbe. Mulyanto menyoroti salah satu bahan baku yang banyak digunakan adalah susu, namun produksi susu dalam negeri masih cukup lemah.

“Produksi dari Kalbe ini sudah bagus, namun penggunaan bahan baku

produk, seperti susu, masih banyak menggunakan impor. Laju pertumbuhan industri mencapai empat persen, sementara suplai bahan baku dalam negeri, pertumbuhannya satu persen. Artinya, semakin hari, impor bahan baku susu makin meningkat,” papar Mulyanto usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan jajaran direksi PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Rabu (11/5).

Mulyanto turut menyoroti lemahnya peternakan dalam negeri sehingga menyebabkan minimnya produksi susu sebagai salah satu bahan baku dari produksi industri Kalbe. “Peternakan lemah karena soal pangannya, pakan ternak

yang lemah. Beda dengan Australia yang memiliki *range* yang besar, sedangkan Indonesia cenderung kecil sehingga pakannya juga terbatas. Kecuali mungkin di sejumlah wilayah yang punya lahan luas, seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB),” jelas Mulyanto.

Mulyanto memastikan Komisi VII DPR akan mengundang Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan rapat gabungan guna mencari solusi dan strategi dalam meningkatkan pakan ternak dan peternakan di Indonesia. “Dengan itu, perlahan-lahan kita bisa mereduksi impor kita, sehingga ke depannya kita bisa swasembada, itulah yang kita harapkan,” pungkas Mulyanto.

Selain perihal impor bahan baku, Mulyanto juga menyoroti keterlibatan tenaga kerja lokal atau setempat di PT. Kalbe. “Pelibatan masyarakat setempat itu juga penting, karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Diketahui, karena PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals merupakan industri yang baru saja pindah dari Cakung, Jakarta Timur, maka pekerja yang digunakan juga masih merupakan pekerja dari pusat. Namun, Mulyanto berharap agar ke depannya perekrutan pegawai baru dilakukan melalui penduduk setempat. “Bersamaan dengan pertumbuhan pabrik ini, nanti akan dilakukan perekrutan pegawai baru. Kami harapkan pegawai barunya nanti harus dari penduduk setempat, wajib,” tutup Mulyanto. ■ ica/sf

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Icha/nvl



Saleh Daulay: Pelonggaran Pemakaian Masker Jangan Membuat Lengah

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan pelonggaran pemakaian masker yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia berharap kebijakan ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Sekaligus dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan masyarakat yang diminta memakai masker lebih dua tahun terakhir.

“Saya yakin, kebijakan ini sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang matang. Selain penyebaran virus Corona yang sudah turun, pelaksanaan imunisasi yang sudah hampir merampungkan tahap I dan II menjadi pertimbangan. Apalagi didukung oleh penggalakan vaksin booster yang semakin hari semakin tinggi di tengah masyarakat,” ujar Saleh dalam siaran pers kepada **Parlementaria**, Rabu (18/5).

Meski demikian, ia berharap pelonggaran ini tidak membuat masyarakat menjadi lengah. Dengan kata lain, protokol kesehatan standar tetap harus dijalankan. Di tempat-tempat keramaian harus tetap memakai masker. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan harus tetap dilaksanakan. Begitu juga cuci tangan, itu harus menjadi kebiasaan.

Sebab, kebersihan anggota tubuh menjadi sangat penting baik di masa pandemi ataupun di masa normal. Kebersihan adalah kunci utama kesehatan, itu berlaku universal. Karena itu, kebersihan harus tetap dijaga dan digalakkan.

Tidak hanya itu, makanan juga harus tetap dijaga. Pemberian gizi yang baik sangat berimplikasi pada kesehatan dan ketahanan tubuh. Meskipun tidak mahal, tetapi makanan yang dikonsumsi harus diupayakan yang memenuhi keseimbangan gizi. Sosialisasi terhadap hal ini perlu ditingkatkan dan digalakkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap kebijakan terbaru ini dapat membuka pintu yang mengalihkan kita ke fase endemi. Ia meyakini bahwa fase

endemi ini bisa dilalui bersama jika ada kesadaran untuk saling menjaga dan saling mengingatkan. Saling menjaga kesehatan, saling mengingatkan agar semua bisa sehat.

“Soal menuju fase endemi itu, kita tentu harus bersabar. Ada banyak faktor yang masih perlu dikaji dan didalami. Jika nanti sudah dianggap tepat, status endemi tersebut pasti akan diumumkan. Namun, kita tentu diperbolehkan untuk melakukan pelonggaran-pelonggaran. Negara-negara lain juga sudah melakukan hal yang sama,” pungkas Saleh menutup pernyataannya. ■ **ayu/aha**

Anggota Komisi IX DPR RI
Saleh Partaonan Daulay.
Foto: Dok/ri/1



Komisi X Dukung Perlunya Keberadaan Regulasi untuk Profesi Pramuwisata

Komisi X DPR RI mendukung usulan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI) terkait perlunya regulasi untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, khususnya untuk profesi pramuwisata/pemandu wisata. Menurut Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan perlu dilakukan guna mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bidang kepariwisataan Indonesia.

“Saya kira nanti semua yang menjadi isu yang akan didorong, nanti bisa diintegrasikan dalam revisi Undang-Undang Kepariwisataan. Terutama, mungkin bisa didorong dengan dibentuk bab khusus tentang pramuwisata ini. Karena kalau aspirasinya sampai pada level membuat undang-undang khusus, memang di kami belum ada agendanya,” ujar Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI bersama DPP HPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melihat, permasalahan yang diungkapkan DPP HPI ini menyangkut

banyak hal, mulai dari belum adanya payung hukum yang cukup jelas, masih adanya banyak aturan yang bersifat temporer juga adanya aturan yang berbeda antar daerah. Ia menilai, aspirasi yang disampaikan DPP HPI tersebut dapat dilakukan dengan diintegrasikan permasalahan tersebut dalam revisi UU Kepariwisataan yang sedang dibahas Komisi X DPR RI.

“Nah karena itu, nanti akan terus kami minta masukan bapak-ibu sekalian menyangkut soal aspirasi ini yang nanti akan kami sempurnakan dalam bagian dari revisi Undang-Undang Kepariwisataan,” pinta Huda. Selain itu, Komisi X DPR RI mendorong DPP-HPI, untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya dalam menyiapkan SDM kepramuwisata/pemandu wisata.

Sebelumnya, DPP HPI menyampaikan bahwa pramuwisata memerlukan regulasi sendiri dalam menjamin keberlanjutan sektor pariwisata. sebab beberapa peraturan yang ada saat ini memerlukan revisi seperti Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengaturan Wisata, serta revisi UU Kepariwisataan. Dalam rapat tersebut, DPP HPI juga menyampaikan naskah RUU tentang Pramuwisata Indonesia untuk menjamin peran strategis pramuwisata/pemandu wisata dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat mengikuti RDPU Komisi X DPR RI bersama DPP HPI. Foto: Devi/nvl

■ hal/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. Foto: Mentari/nvl

Misbakhun Soroti Rencana Perubahan APBN 2022 Pasca-Pandemi Mereda

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti rencana perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Perubahan bisa terjadi karena dinamika makro ekonomi, baik dalam maupun luar negeri, juga seiring dengan mulai meredanya pandemi Covid-19.

Misbakhun mengungkapkan, terdapat dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk merombak

APBN 2022. Opsi pertama, melalui mekanisme APBN Perubahan. “Ini tentunya kita ubah adalah Undang-Undang APBN dengan perubahannya dan postur bagian mana yang ingin diubah pemerintah,” kata Misbakhun kepada awak media, Jumat (13/5).

Opsi kedua, kata Misbakhun, pemerintah bisa melakukan perubahan terhadap APBN 2022 melalui Peraturan Presiden (Perpres). Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, cara tersebut bisa dilakukan seperti perubahan pada APBN-P 2020 lalu. Meski demikian, pilihan tersebut akan

dikembalikan pemerintah, karena memiliki kewenangan sepenuhnya.

Dalam hal ini, pemerintah tinggal membicarakan khusus kepada DPR, apakah menggunakan opsi pertama atau kedua. “Tentunya ini tanpa mengurangi peran dan fungsi DPR di dalam penyusunan. Semuanya masih melibatkan DPR. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir pemerintah gunakan mekanisme apapun tetap akan melibatkan DPR sehingga pemerintah mendapatkan legitimasi politik di sana,” jelas legislator dapil Jawa Timur II itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah membuka alokasi APBN yang cukup besar untuk penanganan pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Meredanya penularan kasus tersebut membuat anggaran penanganan pandemi perlahan dapat beralih ke fungsi lainnya.

Menkeu Ani menyebut bahwa pemerintah akan menyesuaikan belanja program PEN, yang menjadi bantalan perekonomian dan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut tertuang dalam penyesuaian APBN yang akan dibahas bersama DPR. ■ rdn/sf

BKSAP DPR Kecam Penembakan Jurnalis Al-Jazeera oleh Militer Israel

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengecam insiden penembakan jurnalis senior dari kantor berita internasional Al-Jazeera berkebangsaan Palestina, Shireen Abu Akleh, yang ditembak mati oleh militer Israel. Menurut Fadli, okupasi Israel di wilayah Palestina yang diiringi kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa berupa tewasnya

warga sipil sudah melewati batas kemanusiaan.

“Jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, ditembak mati oleh militer Israel. Kebradaban Israel semakin menjadi-jadi dan tak terkendali,” kata Fadli sebagaimana dikutip **Parlementaria** melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (12/5). Shireen diketahui meninggal ditembak di bagian kepala saat meliput serangan

militer Israel di Kota Jenin, Tepi Barat, Palestina, pada Rabu (11/5) lalu.

Saat meliput, Shireen sudah menggunakan rompi antipeluru khas jurnalis lapangan setempat yang berwarna biru terang lengkap dengan tulisan besar ‘PRESS’. Shireen ditemani empat rekannya saat meliput ke wilayah Jenin. Salah satu jurnalis yang berada di samping Shireen saat kejadian, Ali al-Samudi, mengatakan kepada The Washington Post, penembakan tidak terjadi di tengah baku tembak seperti dikatakan Israel.

Ali yang juga terluka saat kejadian menyebutkan tidak ada konfrontasi di wilayah itu saat jurnalis yang terkenal di Arab tersebut ditembak. Al Jazeera melaporkan, Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan, Shireen terluka di bagian kepala oleh tembakan peluru tajam kemudian dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis hingga dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. ■ rdn/sf



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Dok/rvl

GKSB Parlemen Indonesia-Palestina Kutuk Israel Tembak Mati Wartawan

Wartawan Al Jazeera, Shireen Abu Akleh (51 tahun) ditembak mati dalam serangan Israel di Tepi Barat pada Rabu (11/5) lalu. Kejahatan kemanusiaan tersebut direspon Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina DPR RI Syahrul Aidi Maazat. Dirinya mengutuk pembunuhan atas wartawan yang sedang menjalankan tugasnya tersebut.

“Israel makin arogan dengan *bekingan* dia yang kuat. Jangankan dengan warga Palestina tak berdosa, dengan wartawan yang termasuk kepada komponen kemanusiaan yang harus dilindungi di medan perang selain petugas kesehatan berani

”

**TENTARA ISRAEL
TAKKAN GEGABAH
UNTUK MELAKUKAN
AKSI JIKA TIDAK
DILINDUNGI**



Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina DPR RI Syahrul Aidi Maazat. Foto: Kresno/nvl

mereka bunuh. Sangat biadab,” tegas Syahrul dalam keterangan persnya yang diterima *Parlementaria*, Kamis (12/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, tentara Israel takkan gegabah untuk melakukan aksi jika tidak dilindungi. Dia juga meminta PBB menelusuri kejadian itu dan memberikan sanksi hukum yang jelas kepada Israel. Terlebih, lanjutnya, perlindungan terhadap wartawan jelas telah disebutkan dalam konvensi Jenewa harus dilindungi dari serangan kedua belah pihak.

Diketahui, dalam melakukan peliputan, wartawan yang berdarah Palestina-Amerika tersebut mengenakan rompi pers yang dengan jelas menandainya sebagai seorang jurnalis saat meliput di kota Jenin. Shireen Abu Akleh merupakan jurnalis yang mulai dikenal sebagai intifada kedua di tengah kekerasan pemberontakan Palestina yang mengguncang Israel dan wilayah pendudukan Tepi Barat sejak tahun 2000 lalu.

Diketahui, tewasnya Shireen tersebut disebabkan peluru tajam penembak jitu Israel bersarang ke lehernya di Kota Jenin di Tepi Barat. Kabarinya, Al Jazeera dan Kementerian Kesehatan Palestina menyalahkan pasukan Israel atas kematiannya. Di sisi lain, militer Israel balik menuding milisi Palestina mungkin bertanggung jawab. Meski demikian, tuduhan Israel dinilai tidak kuat. ■ hal/sf

Kolaborasi dengan Setjen MPR dan DPD, Setjen DPR Buka Latsar CPNS 2022

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar resmi membuka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Lingkungan DPR, MPR, DPD RI Tahun 2022. Ia menekankan Latsar ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menginternalisasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

“Sesuai amanat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, para ASN mendukung *employer branding* ASN yaitu ‘Bangga Melayani Bangsa’. ASN harus mampu memberikan solusi pada persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi

hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi,” tutur Indra saat memberi sambutan di hadapan 150 CPNS lingkungan Setjen DPR, MPR, dan DPD RI di Ruang Pustaloka, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5).

Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi pencapaian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) DPR RI yang kini telah menjadi Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi. Sehingga, secara mandiri dan pertama kali, Pusdiklat DPR RI menyelenggarakan pelatihan yang turut diikuti oleh para CPNS di lingkungan Setjen DPD dan Setjen MPR RI dengan metode *blended learning*. “Semoga ini semakin mempererat hubungan antar lembaga

sesuai dengan *core values* ASN, BerAKHLAK,” ungkap Indra.

Terakhir, di tengah era *triple disruption* dan kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), dirinya menegaskan ASN harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Di mana, harap Indra, pelatihan ini mampu mengasah kompetensi sehingga bisa meningkatkan daya saing baik secara regional, nasional maupun global.

“Melalui Pelatihan Dasar CPNS ini, saatnya kalian membuktikan bahwa kalian memang CPNS-CPNS terbaik yang siap mengabdikan dan bersama-sama memajukan organisasi, baik bagi CPNS di Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal DPD RI, maupun yang di Sekretariat Jenderal MPR RI,” tutup Indra. ■ ts/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pejabat berfoto bersama peserta Pelatihan Dasar CPNS Lingkungan DPR, MPR, DPD RI Tahun 2022. Foto: OJ/Invi

Badan Keahlian Optimalkan *Supporting System* Bagi DPR RI

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI merupakan *supporting system* bagi parlemen untuk memberikan dukungan keahlian pada kelancaran pelaksanaan tugas fungsi-fungsi DPR RI dalam legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam mengoptimalkan dukungan keahlian kepada Kinerja Dewan, BK Setjen DPR RI saat ini telah membentuk berbagai tim yang menunjang berbagai kegiatan di Badan Keahlian di antaranya Tim Kajian atau Info Dwi Mingguan, Tim Pidato dan Tim Seminar.

“Oleh karena itu Rapat Koordinasi Tim Pidato, Tim Dwi Mingguan, dan Tim Seminar Badan Keahlian DPR RI Tahun 2022 ini menjadi penting dilakukan agar tercipta kelancaran koordinasi dan pelaksanaan tugas di Badan Keahlian,” ujar Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul saat memberi sambutan dalam Rakor Tim Pidato, Tim Dwi Mingguan, dan Tim Seminar BK DPR RI Tahun 2022 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/5).

Adapun Tim Kajian atau Info Dwi Mingguan merupakan salah satu dukungan keahlian sebagai bahan bagi Pimpinan DPR RI dalam menjalankan tugas menyampaikan keterangan pers yang berkaitan dengan kegiatan DPR RI paling sedikit satu kali dalam satu bulan dalam masa sidang.

Lebih lanjut Sensi, sapaan akrab Inosentius menjelaskan, Tim Pidato bagi Pimpinan DPR RI ini menyiapkan berbagai jenis permintaan pidato antara lain materi untuk acara/kegiatan ilmiah

(makalah, keynote speech, orasi ilmiah, kuliah umum/studium generale), sambutan untuk acara kementerian/ lembaga (peringatan hari besar, ulang tahun/dies natalis, wisuda), sambutan untuk acara kunjungan kerja, materi untuk buku (bedah buku, sumbangan tulisan, peluncuran buku), materi untuk *talkshow* dan bahan wawancara, *pointers*, dan lain-lain.

Sedangkan Tim Seminar BK bertugas untuk menyiapkan berbagai kebutuhan untuk kegiatan seminar atau diskusi yang berhubungan dengan isu atau kebutuhan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diselenggarakan oleh BK. Keempat, Tim Evaluasi Kelembagaan yang baru saja dibentuk untuk penguatan kelembagaan BK. Berbagai tim dengan kegiatannya tersebut dibentuk agar dapat memenuhi kebutuhan Anggota maupun AKD DPR RI di dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya dukungan keahlian yang diberikan pada pelaksanaan

”

**TIM KAJIAN ATAU
INFO DWI MINGGUAN
MERUPAKAN SALAH
SATU DUKUNGAN
KEAHLIAN**



Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Andri/inv

fungsi-fungsi DPR RI, Inosentius mengatakan, maka diharapkan setiap kebijakan publik, khususnya di DPR RI, harus dilandasi oleh riset atau yang disebut dengan *Evidence Based Legislative Policy Making*. Ia memandang bahwa setiap anggota tim pelaksana atas berbagai kegiatan yang ada pada badan keahlian memerlukan program kerja yang akan dilakukan serta monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang telah dilakukan.

“Oleh karena itu rapat Koordinasi Tim Pidato, Tim Dwi Mingguan, dan Tim Seminar Badan Keahlian DPR RI Tahun 2022 ini menjadi penting untuk dilakukan agar tercipta kelancaran koordinasi dan pelaksanaan tugas di Badan Keahlian. Pada rapat koordinasi hari ini diharapkan dapat mengevaluasi berbagai tantangan, peluang, hambatan dan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing tim tersebut dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya,” tandas Sensi. ■ man/aha

Proyeksi KEM-PPKF Tahun 2023 Dipengaruhi Faktor Eksternal



Kapus PKA BK Setjen DPR RI Helmizar saat mengikuti FGD dengan tema 'Proyeksi KEM-PPKF tahun 2023'. Foto: Tari/nvi

Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Indonesia pada tahun 2023 tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga minyak terutama minyak mentah dunia, harga minyak mentah dunia terutama periode 2015-2021 rata-rata sebesar 53,6 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Kenaikan harga minyak mentah dunia mulai mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan harga rata-rata 67,95 dolar AS per barel.

"Lalu pada tahun 2022 kenaikan minyak dunia masih terus menjadi kenaikan sampai di atas 100 dolar AS per barel yang mencapai 108,26 dolar AS per barel pada Maret dan 101,64 dolar AS pada April 2022 kenaikan harga minyak mentah dunia sangat berdampak pada harga minyak mentah di Indonesia," jelas Kepala Pusat (Kapus) Pusat Kajian Anggaran (PKA BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar saat memberikan sambutan pada

Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema 'Proyeksi KEM-PPKF tahun 2023', di Wisma Graha Sabha Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).

Selanjutnya Helmi mengatakan bahwa dalam APBN 2022, pemerintah menetapkan harga minyak mentah 63,0 dolar AS per barel. Sedangkan saat April 2022 kenaikan harga pasar ekspor mencapai 102,51 dolar AS per barel. Kenaikan ini diharapkan membawa dampak positif pada penerimaan APBN, khususnya penerimaan anggaran dari kebijakan eksplorasi migas sebagai upaya untuk meningkatkan potensi migas, selain meningkatkan angka komoditas menjadi momentum Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspornya. Namun Indonesia juga menghadapi tantangan akibat peningkatan suku bunga The Fed (Bank Sentral Amerika).

"Hal tersebut akan berpotensi untuk memicu terjadinya *capital outflow* di Indonesia dan melemahkan nilai buka dunia terhadap dolar AS. Depresiasi dunia yang akan membebani pembiayaan terkait bahan baku dan

penolong industri, hal ini akan memicu terjadinya inflasi di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut maka urgensinya pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal.

Salah satu fokus konsolidasi fiskal yang akan dilakukan pemerintah adalah upaya peningkatan pada titik pendapatan dalam strategi yang akan dipupuk melalui peningkatan penerimaan sektor perpajakan," jelas Helmi menutup sambutannya.

Sebelumnya Helmi menjelaskan, PKA BK DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas DPR di bidang anggaran. Salah satu fungsi pusat kajian anggaran yaitu penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengkajian anggaran dan pelaksanaannya.

Guna melaksanakan disfungsi anggaran, lanjut Helmi, maka diperlukan adanya data informasi yang akurat dan *ter-update*. FGD PKA BK DPR RI ini menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna penyusunan kajian. ■ mri/sf

Badan Keahlian DPR Terima Kunjungan Japan Initiative

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI yang diwakili oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tanti Sumartini menerima kunjungan Japan Initiative, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Governmental Organization/NGO) yang bergerak di bidang advokasi. Tanti menjelaskan pertemuan ini merupakan sebuah langkah pengenalan program dan peninjauan kerja sama antar lembaga.

“Kunjungan ini adalah kunjungan NGO bernama Japan initiative. Mereka *tuh* punya Program Review namanya. *Nah*, Program Review ini didanai oleh pemerintah Jepang, memakai APBN Jepang. Jadi mereka ini NGO tapi didanai. *Nah*, mereka tujuannya ke sini memperkenalkan program itu,” jelas Tanti di Ruang Rapat Konstitusi, Gedung

Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (18/5).

Lebih lanjut Tanti menjelaskan, program ini bisa saja diterapkan di Indonesia khususnya di DPR RI, mengingat terdapat irisan fungsi antara DPR RI dengan ‘Program Review’ yang digagas oleh Japan Initiative ini. “Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Sangat bisa. Karena itu membantu fungsi pengawasan (DPR), khususnya pengawasan kebijakan pemerintah yang notabene dilakukan oleh DPR dan Badan Keahlian sebagai *support system*, kita oke aja. Artinya tetap akan mendukung seandainya program itu dilaksanakan di kita,” jelas Tanti.

Tanti juga menambahkan, ada potensi kerja sama yang dapat dibangun antara Japan Initiative sebagai inisiator ‘Program Review’ dengan Badan Keahlian DPR RI. Namun

realisasi hal tersebut masih harus dikaji dan dipelajari lebih lanjut. “Sebagai Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam hal ini Badan Keahlian, mungkin saja bisa terjadi kerja sama. Entah itu nanti misalnya tukar menukar program atau kita mengikuti program mereka, atau mereka mengikuti program kita. Karena ada irisan yang bisa kita kerjasamakan,” tutup Tanti.

Hadir dalam kesempatan tersebut Taki Kitada, Program Manager Japan Initiative beserta Shin Ito, Kento Onaka dan Shun Tanaka. ‘Program Review’ yang dimaksudkan pada pertemuan ini adalah metode evaluasi secara terbuka bersama dengan masyarakat yang telah berhasil diterapkan di Jepang. ‘Program Review’ ini juga mulai diterapkan di Indonesia melalui beberapa kegiatan bantuan yang didanai oleh Pemerintah Jepang.

Pada kesempatan tersebut, baik Japan Initiative maupun perwakilan badan keahlian DPR RI juga berdiskusi dan berbagi cerita terkait pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen di masing-masing negara, khususnya terkait dengan pembuatan undang-undang. Selain itu, sebelum pelaksanaan diskusi, delegasi Japan Initiative juga berkesempatan mengunjungi Museum DPR RI serta Ruang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara. ■ [we,uc/sf](#)



Badan Keahlian Setjen DPR RI saat menerima kunjungan Japan Initiative. Foto: Munchen/nvl

Ittama DPR Luncurkan SIMAWAS, Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan

Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Sosialisasi Manajemen Pengawasan sekaligus peluncuran aplikasi SIMAWAS (Sistem Informasi Pengawasan). Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan SIMAWAS sejatinya merupakan proper (proyek perubahan) dari Inspektur Satu Setjen DPR Moh. Djazuli, dalam rangka memenuhi salah tugas pelatihan kepemimpinan II.

SIMAWAS juga merupakan sebuah pedoman pengawasan, yang diciptakan dalam bentuk sebuah sistem informasi pengawasan. “Sistem informasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau hasil pemeriksaan dan pengawasan internal (dalam hal

ini Ittama DPR RI),” ujar Totok, sapaan akrabnya, saat acara peluncuran di Tangerang, Banten, Kamis (12/5).

Adapun landasan utama pedoman pengawasan itu, menurutnya, adalah karena masih ditemukannya tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK, maupun rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang belum optimal atau belum tuntas. Terkadang, lanjut Toto, audit atau unit kerja, tidak mengetahui ada temuan dari BPK yang belum ditindaklanjuti.

Mengingat dalam sebuah unit kerja kadang terjadi mutasi atau rolling jabatan. Sehingga bukan tidak mungkin ketika terjadi penilaian kinerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru saja menempati unit kerja tersebut. Namun dengan adanya SIMAWAS ini, semua proses penilaian akan lebih mudah terpantau. Termasuk adanya temuan ataupun rekomendasi yang harus

ditindak lanjut dengan tuntas.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Inspektur Satu Setjen DPR Moh. Djazuli menambahkan, saat ini Ittama bukan mencari kesalahan unit-unit kerja di Setjen DPR RI, tapi sebagai *partner* strategis yang memberikan pendampingan dan mengawal seluruh kegiatan Kesetjenan DPR RI berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan adanya SIMAWAS ini, Djazuli menyebutkan, memudahkan auditee (unit kerja di setjen DPR) dan auditor (Ittama) untuk berkordinasi secara *online*. Sehingga semua temuan BPK (baik berupa saran atau rekomendasi) dapat ditindaklanjuti dengan baik dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana aturan yang ditetapkan. “Harapan kami, setiap unit kerja merasa bahwa kami (Inspektorat) merupakan *partner* strategis untuk mencapai visi parlemen yang modern,” pungkas Djazuli. ■ **ayu/aha**



Jajaran Inspektorat Utama Setjen DPR RI saat mengikuti sosialisasi manajemen pengawasan sekaligus peluncuran aplikasi SIMAWAS. Foto: Oji/nvl

BURT Imbau RS *Provider* Jasindo Bali Tingkatkan *Database*



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti saat memimpin kunjungan kerja BURT DPR RI ke Rumah Sakit Kasih Ibu Hospital Group di Denpasar, Bali. Foto: Puntho/nvl

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengimbau setiap rumah sakit (RS) di Bali yang menjadi *provider* PT Asuransi Jasindo selaku pelaksana Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) untuk semakin meningkatkan *database*. Khususnya, *database* seluruh Anggota DPR RI beserta keluarganya.

Demikian disampaikan Novita usai memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka 'pengawasan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarga' ke RS *Provider* PT Asuransi Jasindo (selaku pelaksana program Jamkestama) yaitu Rumah Sakit Kasih Ibu Hospital Group di Denpasar, Bali, Kamis (12/5).

"Terkait data, BURT DPR RI meminta setiap *database* yang dimiliki oleh masing-masing RS yang menjadi *provider* atau yang bekerjasama dengan Jasindo sebagai pelaksana Jamkestama kedepannya harus meningkatkan kepemilikan *database* dari seluruh Anggota DPR RI termasuk keluarga yang meliputi suami, istri dan anak-anaknya," ujar politisi Partai Gerindra tersebut kepada **Parlementaria**.

Novita juga mengapresiasi terobosan layanan *homecare* dan *telemedicine* yang telah tersedia di RS *provider* Jasindo secara khusus yakni di keempat RS yang berada di bawah naungan Kasih Ibu Hospital Group Bali. Mengingat, di era dan pasca pandemi berbagai inovasi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas.

"RS ini juga sudah memiliki dokter-dokter spesialis seperti spesialis urologi dan spesialis jantung yang tersedia dengan bagus. Bahkan, Kasih Ibu Hospital Group dipercaya melayani fasilitas kesehatan acara-acara kenegaraan di Bali. BURT dapat merekomendasikan yakni keempat RS yang ada ini sudah sesuai kebutuhan dan juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas," pungkash Novita.

Turut hadir di antaranya Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad

Dimiyati Natakusumah (Fraksi PKS) dan Wakil Ketua BURT DPR RI H.A. Bakri (Fraksi PAN), serta Anggota BURT DPR RI Sadarestuwati (Fraksi PDI-Perjuangan), Ilham Pangestu (Fraksi Partai Golkar), Eva Yuliana (Fraksi Partai NasDem), Dipo Nusantara Pua Upa (Fraksi PKB), Hamid Noor Yasin (Fraksi PKS) dan Elly Rachmat Yasin (Fraksi PPP).

Serta hadir mendampingi yaitu segenap Direktur Kasih Ibu Hospital Group yakni Direktur Kasih Ibu Hospital Kedonganan dr. Anak Agung Diah Ratna Dewi, Direktur Kasih Ibu Hospital Saba dr. Kadek Dwi Widhyari, Direktur Kasih Ibu Hospital Denpasar dr. Made Ary Puspitasari, Direktur Kasih Ibu Hospital Tabanan dr. Ni Gusti Ayu Made Sri Pujarini dan Branch Manager PT Asuransi Jasindo Bali Cabang Denpasar Hardiansyah. ■ pun/sf



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
MENGUCAPKAN :

**SELAMAT
HARI
KEBANGKITAN
NASIONAL**

20 MEI 2022

